

KEKERASAN SEKSUAL PEREMPUAN DAN ANAK

Pemintaan Perlindungan ke LPSK Meningkat

JAKARTA (KR) - Penanganan dan pencegahan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak harus ditingkatkan. Hal ini karena dari tahun ke tahun, permintaan perlindungan saksi dan korban kasus kekerasan seksual terhadap perempuan serta anak ke LPSK selalu bertambah.

"Karena itu peningkatan penanganan dan pencegahan harus dilakukan," kata Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Sri Nurherwati di Jakarta, Rabu (24/7).

Terlebih, lanjutnya, kenaikan jumlah permohonan perlindungan ke LPSK ini menunjukkan urgensi penanganan yang diperlukan pada anak dan perempuan yang berhadapan dengan hukum. Berdasarkan data LPSK ter-

jadi peningkatan permintaan perlindungan korban kekerasan terhadap anak dari tahun 2022 ke 2023. Permohonan perlindungan dalam tindak pidana seksual terhadap anak ke LPSK pada 2023 berjumlah 973 permohonan. "Padahal pada 2022 hanya sebanyak 537 permohonan," kata Nurherwati seraya menyebutkan, untuk tahun ini per bulan Januari hingga Juni, tercatat ada 135 permohonan perlindungan korban kekerasan seksual terhadap anak yang masuk ke LPSK.

Nurherwati menyebut, fenomena serupa juga terjadi dalam kekerasan seksual terhadap perempuan. Dalam hal ini tercatat yang sebelumnya hanya 99 permohonan perlindungan di 2022 kini meningkat menjadi 214 di 2023. "Untuk tahun ini saja yakni per-

Januari hingga Juni terdapat 135 permohonan yang masuk. Mereka yang melapor mendapatkan perlindungan dari LPSK mulai pemulihan psikologi, perlindungan secara hukum, penasihat hukum hingga perlindungan secara fisik," ujarnya.

Nurherwati meyakini masih banyak korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang belum berani melapor ke LPSK. Karena itu, berharap seluruh korban kekerasan seksual berani untuk melapor agar LPSK dapat melakukan perlindungan dan pemulihan mental korban dengan cepat. "LPSK berharap seluruh stakeholder mau bekerja sama mencegahnya. Bahkan, tak sampai di situ tetapi menindak praktik kekerasan terhadap anak dan perempuan," pungkasnya. (Full)-

Almarhum

Hamzah Haz lahir di Ketapang Kalimantan Barat, pada 15 Februari 1940. Ia mengawali karier sebagai guru pada tahun 1960. Kemudian, menjadi wartawan surat kabar Bebas di Pontianak hingga menjadi Pimpinan Umum Harian Berita Pawau di Kalimantan Barat.

Selain itu, Hamzah pernah menjabat sebagai Menteri Investasi pada era Presiden BJ Habibie, Wakil Ketua DPR RI serta

Menko Kesra era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Setelah itu, Hamzah menjabat sebagai Wapres mendampingi Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri pada 2001-2004.

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi menilai, sosok Hamzah Haz sebagai politisi yang teduh. "Beliau politisi yang sejuk, teduh, tidak berkonflik dan kami sangat kehilangan," katanya.

KPU

Menurut Betty, tahapan coklit data pemilih di Indonesia berjalan lancar, meskipun muncul sejumlah dinamika di daerah yang kini sedang diselesaikan. Proses pemutakhiran data pemilih hingga saat ini masih menyisakan sejumlah pemilih baru serta pemilih yang belum

memenuhi syarat. "Tentu ada pemilih baru, pemilih yang tidak memenuhi syarat, yang kemudian di-update oleh KPU DKI Jakarta. Kita tunggu sampai pukul 24.00 untuk seluruh Indonesia," katanya.

Dikatakan Betty, proses pengumpulan data coklit via aplikasi coklit elektronik (e-

Pemda

menjadi bahan baku industri baik berupa mebel maupun lainnya. Dari proses pemilihan itu kemudian masuk ke Bawuran jadi bahan baku, berproses menjadi barang lain itu pertonnya dihargai Rp 450.000. Jadi sampah itu bukan buangan tapi punya arti komersial. Dengan demikian, ada harga yang dibayarkan pada aktivitas pengolahan sampah dari tingkat rumah tangga atau kalurahan," kata Sultan usai pertemuan.

Sultan mengungkapkan, Pemda DIY telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) untuk membantu percepatan persoalan sampah. Bantuan PT PII bentuknya bisa beragam baik dalam hal pendanaan maupun manajemen program. Dimana ada dua hal yang harus diperhatikan kabupaten/kota dalam penanganan sampah. Pertama, pemilihan dari tingkat rumah tangga. Kedua, perkembangan ITF Bawuran dan Peran PT PII.

"Saya berharap warga masyarakat yang sekarang mau mengelola sampah itu jangan meninggikan pemulung, karena pemulung juga butuh makan. Jangan yang jadi pemulung warga masyarakat di kalurahan, tapi harus kerja sama dan itu nanti diolah," ungkapnya.

Kemiskinan

Hal ini bisa dilakukan melalui dua cara yaitu, meningkatkan pendapatan dan menjaga kestabilan harga terutama bahan makanan.

Pemerintah DIY sebenarnya telah melakukan berbagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan, yang mencakup empat aspek. Pertama, aspek individu, dengan menangani penduduk lansia, difabel, dan lainnya. Kedua, aspek sosial dengan melakukan berbagai kegiatan dan memberikan bantuan sosial. Ketiga, aspek lingkungan dengan memperbaiki kondisi lokasi geografis yang sulit, memberikan bantuan bencana dan lainnya. Keempat, aspek ekonomi dengan melakukan berbagai kegiatan produktif melalui penciptaan kesempatan kerja yang melibatkan penduduk miskin.

Selain itu juga mendorong sektor swasta untuk memberikan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) dan lembaga keuangan dalam kemudahan akses modal.

Untuk menjaga daya beli penduduk termasuk penduduk miskin dilakukan melalui pengendalian inflasi, khususnya terhadap harga komoditas yang memberikan kontribusi besar terhadap garis kemiskinan.

Hasilnya, dalam lima tahun terakhir rata-rata inflasi DIY tercatat sebesar 3,14 persen. Terkait

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Benny Suharsono mengungkapkan, dalam rapat koordinasi itu pihaknya sempat menagih komitmen kabupaten/kota dalam proses pengurangan sampah. Pihak kabupaten/kota diminta memaparkan perkembangan program pengurangan sampah, kapasitas tempat pengolahan sampah mandiri dan proyek kerja sama dengan wilayah lain jika daerah itu belum mampu mengolah sampah secara mandiri. Pihaknya juga mempertemukan kabupaten/kota dengan PT PII yang ke depan akan memfasilitasi proses penyelesaian masalah sampah. BUMN di bawah Kemenuk itu nantinya tidak hanya mendukung dari sisi anggaran secara langsung, tetapi juga pada penyusunan program desentralisasi sampah maupun pendampingan teknis dan manajemen kepada kabupaten/kota di DIY.

"Adapun untuk ITF Bawuran, membutuhkan sedikitnya Rp 400 miliar biaya pembangunan untuk bisa beroperasi. Kerja sama dengan pihak ketiga sifatnya berbentuk pendanaan hijau. Hanya saja perlu penyertaan dana dari Pemerintah setempat sebesar 20 persen," kata Sekda.

"Pendanaan hijauanya dari Amerika Serikat yang kemudian kerja sama dengan Taiwan. Dana 20 persen dari Pemerintah Daerah itu

kan sangat besar, makanya Pemkab Bantul perlu pihak lain," paparnya.

Sementara Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengungkapkan, Pemkab Bantul sudah menjalin kerja sama dengan Pemkot Yogya tentang pemanfaatan ITF Bawuran. Bahkan pihaknya akan berupaya mempercepat operasional sejumlah TPST mandiri di wilayahnya terlebih dahulu. Dengan begitu bisa fokus pada penyelesaian persoalan sampah khususnya di Bawuran dapat dipercepat.

"Kami targetkan September sejumlah TPST bisa dipakai dan beroperasi penuh. Nantinya ITF Bawuran yang dikelola BUMD tentu harus menggunakan prinsip bisnis dalam operasionalnya. Jadi ada insentif dan disinsentif," ujarnya.

Sedangkan Pj Walikota Yogyakarta Sugeng Purwanto menyatakan, produksi sampah yang belum dikelola di Kota Yogyakarta tinggal 60 ton dari total 200 ton perhari. Karena itu pihaknya berharap ITF Bawuran bisa segera beroperasi. Dengan begitu sisa sampah yang belum diserap dapat dibuang ke lokasi tersebut sambil terus mengoptimalkan kapasitas tiga TPST yang sudah berjalan yakni Kuranon, Nitikan, Karangmiri dan TPA Piyungan. (Ria)-

ini, pada tahun terakhir garis kemiskinan naik 5,1 persen bila dibandingkan 2023 sebesar Rp 573.022/kapita/bulan, yang berarti beban penduduk miskin juga bertambah.

Dengan rata-rata pertumbuhan DIY pada periode yang sama sebesar 3,95 persen, maka secara riil ekonomi DIY hanya tumbuh sedikit di atas angka inflasi. Oleh karenanya, mendorong pertumbuhan ekonomi melalui andalan pariwisata menjadi sangat penting, karena akan berdampak luas pada sektor akomodasi dan UMKM.

Selain itu, peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) perlu lebih dioptimalkan.

Selanjutnya, agar percepatan penurunan angka kemiskinan dan jumlah absolut penduduk miskin berjalan efektif, perlu disusun program kerja dan kebijakan yang tepat, dan dapat direalisasikan dengan tepat sasaran. Untuk itu perlu basis data yang lengkap, benar dan akurat, yang mencerminkan kondisi riil penduduk miskin DIY. Pencapaian bantuan sosial yang tidak tepat sasaran dipastikan akan menyulitkan penurunan kemiskinan.

Terkait hal ini, dapat dilakukan perbaikan sebagai berikut; Pertama, peningkatan kolaborasi antara Pemerintah DIY dengan BPS dalam

penyediaan data penduduk miskin yang lengkap, rinci dan mudah diakses. Kedua, penyamaan area lokasi survei BPS dengan lokasi penduduk miskin yang telah diintervensi oleh pemerintah, untuk melihat seberapa kuat korelasi antara kegiatan yang dilakukan dengan penurunan angka kemiskinannya.

Ketiga, data by name by address penduduk miskin harus diupdate secara kontinu. Agar tidak terjadi duplikasi target sasaran kegiatan antar-OPD terkait, perlu ditunjuk satu instansi sebagai koordinator.

Keempat, dalam membuat program pengentasan kemiskinan, Pemerintah DIY harus menggunakan basis data dari BPS dan TKPKD, agar kegiatannya sejalan dengan konsep BPS dan tidak terdapat kendala dalam pelaksanaannya. Kelima, menambah alokasi anggaran dan mengefektifkan pencairannya, serta mendorong swasta untuk menambah CSR di area yang telah ditentukan oleh Pemerintah DIY.

Melalui berbagai langkah tersebut, diharapkan upaya percepatan penurunan kemiskinan DIY memberikan hasil signifikan.

(Penulis adalah Pemerhati Ekonomi dan Sosial, Anggota ISEI Cabang Yogyakarta)-d

TAMPIL PADA SELASA LEGEN DAN HUT YPBSM

Kolaborasi Tari Tunjukkan Hubungan Kuat Indonesia-India



KR-Effy Widjono Putro

'Yatra The Flowing Narrative' dibawakan kolaborasi penari Indonesia dan India.

YOGYA (KR)-Kolaborasi penari India dan Indonesia memawai gelaran Jagedan Selasa Legen di Dalem Pujokusuman, Yogyakarta, Selasa (23/7/2024) malam. Dibawakan dua penari utama Sriradha Paul dari India dan Joko Sudibyo, didukung Dwi Nusa Aji Winamo, Wulung Ait Putra Sidiq Angkin Andita Andorodasih, serta pemusik Dimas Raharja, menjadi warna yang berbeda dengan penampilan lain.

Jagedan Selasa Legen malam itu digelar sekaligus memperingati 62 tahun berdirinya Yayasan Pamulangan Beksa Sasmita Mardawa (YPBSM), Hari Anak Nasional (HAN), dan menyambut siswa baru. Menurut koordinator Jagedan Selasa Legen, Istu Noorhayati, penampilan wayang orang anak-anak lakon 'Senggana Dhuta' yang didukung 25 anak dipergelarkan khusus untuk memperingati HAN tersebut.

Sriradha Paul merupakan konseptor kolaborasi yang diberi tajuk 'Yatra The Flowing Narrative'. Karya tersebut digarap bersama Joko Sudibyo, pe-

nari asal Yogyakarta. Berawal dari saat keduanya bertemu dan bertetangga di Prancis tahun 2021, sehingga terlibat komunikasi intensif khususnya tentang Indonesia.

Joko menyebutkan, Sriradha memang ingin tahu banyak tentang Indonesia karena merasa ada hubungan kuat dengan negaranya. Perempuan penari itu pun mencari sedikit demi sedikit tentang Indonesia, mulai dari gamelan, kisah Ramayana, dan banyak lagi. Akhirnya terjadi ketertarikan untuk membuat karya pada Januari 2022, saat Joko berada di London (Inggris) dan Sriradha berada di India. Rencana bisa terwujud setelah mendapatkan dana khusus membuat karya yang akan dipentaskan di Kolkata, India. Proses dilakukan secara daring, mulai soal kain yang akan digunakan, cerita yang akan diangkat, November 2022, karya yang mengambil kisah Ramayana pada bagian Jatayu mokswa tersebut berhasil terwujud dan bisa diterima di depan peneliti dari seluruh dunia saat dipentaskan di Kolkata. (Ewp)-f

TAK HANYA SOAL PAKAIAN

Kebaya Diharapkan Jadi Identitas Bangsa

JAKARTA (KR) - GKBRAA Paku Alam menghadiri Puncak Acara Peringatan Hari Kebaya Nasional ke-1 Tahun 2024 di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (24/7). Istri Wakil Gubernur DIY tersebut berharap kebaya bisa menjadi identitas bangsa dan tetap lestari dari masa ke masa.

"Kebaya tidak hanya soal pakaian saja, tapi menurut saya itu adalah budaya kita. Karena itu, saya senang sekali dengan adanya Hari Kebaya Nasional, peringatan ini jadi memicu generasi muda untuk berkebaya, dan harapan saya kebaya jadi identitas bangsa Indonesia," kata Gusti Putri usai mengikuti Puncak Acara Peringatan Hari Kebaya Nasional ke-1 Tahun 2024 yang dihadiri Presiden Joko Widodo beserta Ibu Negara Iriana Joko Widodo.

Peringatan Hari Kebaya Nasional ke-1 Tahun 2024 ini mengangkat tema 'Lestarkan Budaya dengan Bangsa Berkebaya'. Hari Kebaya Nasional sendiri ditetapkan melalui Keppres No 19 Tahun 2023.

Gusti Putri menuturkan, kebaya memiliki daya magis tersendiri sebagai sebuah budaya berbusana. Perempuan yang menggunakan kebaya sejak dulu hingga kini pasti tampak lebih manawan. Kebaya juga dapat mencerminkan keluwesan dan keanggunan perempuan.

Ketua Umum Kowani Giwo Rubianto Wiyogo mengatakan, Hari Kebaya Nasional merupakan momentum bersejarah bagi seluruh perempuan Indonesia. Karena peringatan Hari Kebaya Nasional merupakan perjalanan panjang dan pekerjaan rumah dalam pelestarian kebaya sebagai warisan budaya tak benda dari UNESCO.

Dalam acara itu dianugerahkan Ibu Bangsa kepada Ibu Negara Iriana Joko Widodo oleh Kowani. Sementara Pendiri MURI Jaya Suprana menyerahkan MURI Award, pemecahan rekor dunia 'Peserta Terbanyak, 9.250 Perempuan Berkebaya dalam rangka Hari Kebaya Nasional'. (Ria)-f

Sapa

memberikan perintah sebagai kepala daerah, namun metafora konseptual penggunaan struktur domain sumber yang berkorelasi dengan domain target. Lebih memberikan makna bahwa rakyat adalah sosok manusia sebagai makhluk Tuhan, bukan sekadar bawahan.

Menurutnya, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan makna konseptual, makna asosiatif dan makna tematik dari pidato sapa aruh Sri Sultan HB X yang disampaikan selama masa pandemi Covid-19 melanda Yogyakarta.

Teks Sapa Aruh membangkitkan kesadaran masyarakat, agar dalam menghadapi Pandemi Covid-19 lebih bersifat rasional namun tetap mengindahkan martabat orang Jawa yang percaya pada makna filosofi Jawa. "Pidato tersebut sekaligus menunjukkan bahwa pandemi tidak harus dihadapi dengan panik dalam segalanya," tegas Octo. "Filosofi Jawa yang selama ini banyak dilupakan, kaya makna untuk bekal hidup," tambahnya.

Rektor UNY menyebut, Octo

Sambungan hal 1

Lampito merupakan Doktor ke-95 dari Program Doktor pada Prodi Ilmu Pendidikan Bahasa FBSB UNY sekaligus Doktor ke-120 dari Program Doktor pada Prodi Ilmu Pendidikan Bahasa Program Pascasarjana UNY. Sebagai wartawan, Octo

Lampito telah malang-melintang dalam berbagai liputan baik nasional maupun internasional. Sejumlah negara termasuk mengikuti short course Amerika Serikat telah dikunjungi. Sejumlah buku pun juga telah terbit buah karyanya. (Sal)-d



Prakiraan Cuaca						Kamis, 25 Juli 2024	
Lokasi	Pagi	Siang	Malam	Dini Hari	Suhu C	Kelembaban	
Bantul					22-30	65-95	
Sleman					22-29	65-95	
Wates					22-29	65-95	
Wonosari					22-30	65-95	
Yogyakarta					22-30	65-95	

Efektif Mana Kebijakan Subsidi ataukah Bantuan Langsung Tunai?



Creative Economy Park



Dr. Ismadiyah Purwaning Astuti, SE MSc
Prodi Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Sosial
Universitas Amikom Yogyakarta

KEBIJAKAN subsidi dan bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat merupakan instrumen yang digunakan oleh pemerintah untuk menjaga stabilitas

ekonomi serta menurunkan kemiskinan dan ketimpangan. Kebijakan subsidi dan BLT diperuntukkan untuk masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan hidup akibat kenaikan harga barang dan jasa serta memudahkan akses untuk pelayanan publik, ekonomi dan sosial. Kenyataannya, kebijakan tersebut ada yang salah sasaran, tidak hanya dinikmati oleh masyarakat miskin tetapi lebih banyak dinikmati oleh masyarakat menengah ke atas sehingga membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Tidak ada negara di dunia yang tidak menggunakan subsidi sebagai instrument dalam pembangunan ekonomi. Subsidi sendiri merupakan bantuan yang

diberikan oleh pemerintah terhadap rumah tangga atau badan usaha untuk mengurangi harga yang dapat meningkatkan pengeluaran. Penerapan subsidi ini dapat membantu penurunan harga barang dan jasa sehingga masyarakat miskin dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menjaga daya beli masyarakat. Energi merupakan barang yang disubsidi oleh pemerintah seperti bahan bakar minyak jenis BBM tertentu, LPG dan Listrik untuk konsumsi rumah tangga dan usaha mikro sehingga harganya terjangkau oleh masyarakat yang membutuhkan. selain itu, ada juga subsidi non energi seperti subsidi harga kebutuhan pokok, subsidi pajak dan subsidi bunga

kredit. Disisi lain, subsidi juga memiliki dampak negatif yaitu alokasi sumber daya negara menjadi tidak efisien karena sebagian besar digunakan untuk kegiatan konsumtif. Subsidi yang disalurkan seringkali tidak tepat kepada masyarakat yang membutuhkan karena banyak masyarakat menengah ke atas yang menerima dan menikmati subsidi dari pemerintah. Subsidi juga berdampak pada penurunan harga menyebabkan kualitas produk menjadi berkurang. selain itu, kebijakan subsidi dapat mengganggu harga di pasar sehingga dapat membunuh pesaing di sektor swasta. Kebijakan BLT juga menjadi kebijakan andalan

pemerintah pada situasi darurat. BLT sendiri merupakan program bantuan sosial yang memberikan dukungan keuangan secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan untuk meringankan beban ekonomi. Pemerintah memberikan BLT agar memberikan manfaat yang nyata bagi penerima dan upaya untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Ada banyak bantuan sosial yang pernah dikucurkan oleh pemerintah seperti bantuan sembako, bantuan langsung tunai, BLT dana desa, insentif tarif Listrik, kartu prakerja, subsidi gaji karyawan, dan BLT UMKM. Program bantuan langsung tunai dianggap tidak mendidik karena dianggap sebagai program yang dapat

membentuk mental masyarakat menjadi pemalas dan peminta-minta. Walaupun program BLT dianggap ampuh dalam mempertahankan daya beli masyarakat akibat dampak inflasi. Meskipun program BLT telah dinilai sukses tetapi terdapat banyak kelemahan yaitu pembagian tidak merata karena menggunakan data lama atau tidak terupdate, program ini menciptakan peluang korupsi melalui pemotongan dana bantuan, kurang koordinasi pemerintah pusat dan daerah, jumlah nominal insentif tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kesulitan ekonomi yang dihadapi oleh orang miskin dan program ini juga menimbulkan konflik sosial di masyarakat. Program BLT di Indonesia

sering dinilai banyak kelemahan tetapi Bank Dunia melaporkan penyelenggaraan BLT di Indonesia yang paling sukses dibandingkan dengan negara lain. Subsidi juga dianggap banyak yang tidak tepat sasaran atau banyak orang yang menentang ke atas menikmati subsidi. Program dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah khususnya kebijakan subsidi dan BLT harus banyak perbaikan dari sisi teknis, data masyarakat yang terupdate dan sistem yang baik sehingga dana yang dikeluarkan dari APBN tepat sasaran dan dapat mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.